

Judul : DPR: Bulog, Dukunlah Petani
Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Produksi Beras Surplus

DPR: Bulog, Dukunlah Petani

Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka menyoroti kinerja Perum Bulog setahun belakangan ini.

Bulog yang seharusnya menjadi penyangga petani, kini malah terkesan mencari untung dengan program impor beras.

"SAYA ini orang paling mendukung Bulog selama ini. Tapi terus terang, saya kecewa dengan Bulog terakhir ini. Kenapa mengagalkan impor (beras) 1 juta ton walau yang disetujui 500 ribu ton," kata Suhardi dalam rapat kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Perum Bulog, Holding Pangan ID Food, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Suhardi mengatakan, untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog seharusnya lebih memprioritaskan pembelian hasil produksi beras gabah dari petani. Saat ini kemampuan Bulog membeli beras di pasaran adalah Rp 8.200 per kilogram. Sementara harga di tingkat petani sudah mencapai Rp 9.500 sampai 10 ribu per kilogram. "Kalau harga segitu (Rp 8.200 per kilogram), tentu tidak ada petani yang mau jual ke Bulog," ujarnya.

Dia menuturkan, harga gabah dan beras memang mengalami

kenaikan karena harga produksi di tingkat petani juga mengalami kenaikan. Kenaikan dipicu oleh harga pupuk dan biaya ongkos transportasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Walau ada kenaikan di tingkat petani, semestinya tidak menjadi dalih bagi Pemerintah untuk membuka keran impor.

"Bulog tidak lagi mendukung petani malah mencari keuntungan dari impor karena memang lebih murah dari dalam negeri. Kalau seperti ini, petani kita tidak akan ada lagi yang mau menyangga," tambah politisi Partai Demokrat ini.

Suhardi menilai, mestinya kebijakan impor beras mengacu data produksi Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi dalam negeri cukup. Data BPS menyebutkan, produksi beras mencapai 32,07 juta ton atau setara 54 juta ton gabah dan ada surplus beras 1,7 juta ton lebih. "Kalau kita katakan tidak cukup, terus data mana yang kita percayai," ucapnya.

Menurutnya, jika memang tidak percaya sama data Kementerian, semestinya data BPS-lah yang menjadi pijakan dalam keputusan impor beras. "Kalau tidak gunakan data BPS, data mana lagi yang kita percaya. Atau semua data kita tidak percaya," jelasnya.

Suhardi juga menyoroti anggaran sektor pertanian yang terus mengalami penurunan sejak 2017 mencapai Rp 24,23 triliun dan kini Rp 16,44 triliun di tahun 2022. Penurunan anggaran ini diduga disebabkan dua hal. Pertama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran yang kurang lobi ke Kemenkeu sehingga anggaran turun terus.

Faktor kedua, Pemerintah tidak lagi menjadikan sektor pertanian sebagai sektor prioritas. "Ini harus jadi perhatian kita bersama bukan hanya Kementerian tapi juga Komisi IV untuk fokus melihat persoalan ini," jelasnya.

Sementara anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin menilai, kinerja Kementerian cukup baik pada tahun 2022. Kementerian mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Produksi per-

tanian juga memenuhi target.

Sesuai data, jelas dia, produksi beberapa komoditas utamanya bahan pangan yakni padi dan jagung mengalami peningkatan meskipun anggaran Kementerian mengalami penurunan. Produksi komoditas pangan mengalami peningkatan salah satunya keberhasilan kinerja kredit usaha rakyat (KUR) di sektor pertanian yang mencapai Rp 90 triliun.

"Ini menandakan bahwa sektor pertanian itu sudah bankable, dipercaya oleh perbankan, itu luar biasa. Saya patut apresiasi ini meski APBN menurun tapi KUR pertanian meningkat," tutup Andi.

Sementara, Menteri Syahrul Yasin Limpo mengatakan, serapan anggaran Kementerian tahun 2022 mencapai Rp 15,65 triliun atau 95,15 persen dari pagu APBN. Kinerja ini tergolong baik di tengah tantangan pembangunan pertanian selama satu tahun terakhir akibat dampak Pandemi Covid-19. Belum lagi dampak konflik Rusia-Ukraina serta dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan krisis pangan dan energi.

Syahrul mengatakan, capaian beberapa output utama Kementerian 2022 di antaranya, program

pengembangan padi terealisasi 100,23 persen dari target 963,38 ribu hektare. Pengembangan jagung 105,93 persen dari target 408,31 ribu hektare. Kawasan bawang merah 100 persen dari target 5,983 hektare. Lalu, kawasan bawang putih 100 persen dari target 1,700 hektare, kawasan tebu 100 persen persen dari target 4,800 hektare.

Berikutnya kawasan kopi 100 persen dari target 18,393 hektare, optimalisasi reproduksi 114,33 persen dari target 3 juta ekor, KUR 126,03 persen dari target Rp 90 triliun. Lalu, penyediaan embung pertanian 99,75 persen dari target 400 unit, alsintan prapanen 100 persen dari target 21,448 unit. Serta, alsintan pascapanen dan pengolahan tanaman pangan 96,74 persen dari target 4,726 unit.

Capaian tersebut, lanjut Syahrul, melalui usaha keras semua jajaran pertanian di tingkat pusat maupun daerah, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya.

"Tentunya juga berkat dukungan dan arahan pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV di berbagai kesempatan. Pada akhirnya, kita semua dapat melaluinya dengan baik," kata Syahrul. ■ KAL